

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan antara pemerintah daerah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang memisahkan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) yang dapat menyebabkan suatu masalah keagenan (*agency problem*).¹ *Agency problem* yang dimaksud adalah terjadinya informasi yang tidak sama antara yang dimiliki oleh pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen). Untuk mengurangi permasalahan diatas diperlukan adanya monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan monitoring untuk mengurangi adanya *agency cost*. Laporan keuangan menjadi faktor utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin jelas dan berkualitaskannya pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah ialah pihak yang dipilih dan dipercaya oleh publik untuk bekerja demi kepentingan publik, sehingga pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan publik.² Dengan demikian, pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (agen) mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

¹ Michael C. Jansen dan William H. Meckling, "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure," *Journal of Financial Economis* 3, no. 4 (1976): 308-310, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X7690026X>.

² Dwi Febri S, dkk., "Pengaruh Penerapan Sap, Kompetensi Sdm Dan Spip Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Di Kota Jambi)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan UNJA* 4, no. 3 (2019): 40, <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/8136/6226>.

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat selaku pihak pemberi amanah (prinsipal) yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban.³ Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik atau masyarakat sebagai pihak prinsipal. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menyusun laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan serta dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Dengan demikian, transparansi melalui laporan keuangan akan memberikan kontribusi untuk menyelaraskan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan masyarakat serta akseibilitas laporan keuangan dapat terwujud.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan daerah adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik.⁴ Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.⁵ Pemerintah selaku penyedia laporan keuangan daerah harus menyediakan informasi yang akurat dan berkualitas, sehingga laporan

³ As Syifa Nurillah dan Dul Muid, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)," *Diponegoro Journal of Accounting* 1, no. 1 (2012): 3.

⁴ Diana Puspita, dkk., "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma," *Jurnal Fainess* 10, no. 2 (2020): 79.

⁵ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hlm. 98.

keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang memuat informasi yang konsisten dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat empat karakteristik kualitatif yang merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang diharapkan antara lain:⁶

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Karakteristik informasi yang relevan sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Memberikan manfaat prediktif (*predictive value*)
- c. Disajikan tepat waktu (*timeliness*)
- d. Lengkap

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Karakteristik informasi yang andal sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur (*faithfulness of presentation*)
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

⁶ “Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”, Kerangka Konseptual Paragraf 35: 10-12, <https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf> diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

c. Netralitas

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintahan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan maka perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan yang memadai atas aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pentingnya kualitas dari laporan keuangan akan berguna untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Bagi pemerintah daerah penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu kewajiban.⁷ Kualitas laporan keuangan daerah akan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Penyajian laporan keuangan yang

⁷ Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 11, no. 2 (2020): 170.

berkualitas juga tercantum dalam dalil Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertawaklah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan berkata jujur (benar). Definisi jujur dalam hal konteks ini mencakup banyak segi kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana laporan keuangan disajikan. Isi dari sebuah laporan keuangan harus menunjukkan sesuatu benar terjadi dan di dukung dengan bukti transaksi. Penyajiannya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Semua data yang muncul dalam laporan keuangan menjadi tanggungjawab suatu entitas pelaporan. Hal ini sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang di dalamnya termuat keandalan dari sebuah laporan keuangan yakni laporan yang disajikan berdasarkan kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Sistem pengendalian internal adalah sekumpulan sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal yang memadai membuat akuntan mampu menyajikan data keuangan dengan baik sebagai dasar pengambilan keputusan.⁹ Oleh karena itu, pengendalian internal mempunyai kontribusi yang penting

⁸ Al-Qur'an, al-Ahzab ayat 70, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: Departemen Agama RI, Media Insani Publishing, 2007), hlm. 427.

⁹ Emy Pevitasari dan Mimin Nur Aisyah, "*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal*," *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 7, no. 3 (2018): 2.

terhadap kualitas dari sebuah laporan keuangan. Sistem pengendalian internal juga berfungsi sebagai alat untuk menghemat dan mencegah terjadinya pemborosan yang akan berdampak pada kerugian entitas.¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah yaitu suatu proses tindakan dan aktivitas yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh pegawai dalam memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, penjagaan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.¹¹ Setiap entitas pelapor dan akuntansi wajib menyelenggarakan SPI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *The Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* menjelaskan bahwa tiga tujuan dari pengendalian internal diantaranya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.¹² Selain itu, COSO juga menyatakan bahwa terdapat lima komponen utama pengendalian internal diantaranya¹³:

1. Lingkungan Pengendalian

Perspektif manajemen dan karyawan tentang pentingnya pengendalian internal organisasi merupakan bagian dari lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian sangat penting karena menjadi dasar bagi efektivitas elemen pengendalian yang lain.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko adalah analisis resiko yang menentukan bagaimana resiko dikelola agar suatu entitas

¹⁰ Novtania Mokoginta dan Linda Lambey Winston Ponton, “Pengaruh Sistem Pendendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017): 875.

¹¹ “Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah”, https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIIP.pdf diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

¹² Sukrisno Agus, *Auditing* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

¹³ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), 262-265.

dapat mencapai tujuannya. Resiko harus dianalisa dan dievaluasi terkait dengan kemungkinan terdapat resiko dan dampaknya terhadap organisasi. Setelah resiko dianalisa dan dievaluasi maka bisa diperkirakan tindakan apa yang harus dilakukan untuk meminimalkannya.

3. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan rentang waktu yang tepat sehingga memungkinkan orang-orang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yaitu kebijakan dan prosedur yang diterapkan organisasi untuk memastikan telah dilakukannya pengendalian yang memadai serta respon resiko yang telah dilakukan secara efektif.

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan tahapan akhir dimana pemantauan digunakan untuk memastikan apakah pengendalian internal sudah diterapkan dan berjalan dengan sesuai. Keseluruhan manajemen resiko harus dipantau dan dilakukan modifikasi seperlunya jika ditemukan masalah.

4. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemahaman standar akuntansi pemerintah adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.¹⁴ Standar Akuntansi Pemerintahan sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan dan untuk menghindari timbulnya implikasi negatif tentang rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pengauditan. Dengan demikian, pemerintah wajib

¹⁴ Lailatur Rohmah, dkk., "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang," *E-JRA* 9, no. 5 (2020): 45.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP.¹⁵

Kerangka konseptual merupakan dasar utama dalam pembuatan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual digunakan sebagai rujukan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam pembuatan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan ketika mencari solusi untuk masalah yang tidak dibahas dalam pernyataan standar akuntansi.¹⁶ Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat dua belas pernyataan standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut¹⁷:

- 1) PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Tujuan pernyataan ini yaitu untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan daya banding laporan keuangan yang baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Sehingga laporan keuangan disusun dengan menetapkan basis akrual.
- 2) PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Tujuan standar ini ialah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pelaporan realisasi anggaran memiliki tujuan untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan.
- 3) PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan. Arus kas dapat dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama

¹⁵ Nanang Agus Suyono, "Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo)," *Jurnal PPKM III*, (2016): 238.

¹⁶ Nunuy Nur Afiah, dkk., *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020), 25.

¹⁷ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), 275-307.

satu periode akuntansi. Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas bisa dijadikan laporan pertanggungjawaban suatu entitas dalam mengambil sebuah keputusan.

- 4) PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan yaitu memberikan keterangan atas informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya keterangan atau informasi yang diberikan mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi dalam laporan keuangan tersebut.

- 5) PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan

Tujuan dari standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu untuk disajikan dalam laporan keuangan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki oleh proyek swakelola dan dibebankan ke dalam akun konstruksi dalam pengerjaannya dan instrumen keuangan tidak diatur dalam standar ini.

- 6) PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas, investasi dalam perusahaan asosiasi, kerjasama operasi dan investasi dalam properti tidak diatur oleh standar ini.

- 7) PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai catat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

- 8) PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Standar ini

memberikan panduan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruk dalam pengerjaan, penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca, penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

- 9) PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
Tujuan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, nilai tercatat, amortisasi, dan biaya yang dibebankan terhadap kewajiban.
- 10) PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- 11) PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum agar dapat meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.
- 12) PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional
Tujuan standar pernyataan ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah agar terpenuhinya tujuan dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Pelaporan operasi bertujuan dalam memberikan perincian tentang aktivitas operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.

Adanya penjelasan diatas maka pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 memiliki peranan yang sangat penting agar nantinya sumber daya manusia bisa mempunyai wawasan yang cukup dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

5. Peran Auditor Internal

The Institute of Auditors (IIA) mendefinisikan bahwa auditor internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan menaikkan kegiatan operasi organisasi. Tujuan organisasi dapat tercapai apabila auditor internal organisasi tersebut telah menerapkan pendekatan yang terstruktur dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko, pengendalian, dan tata pengelolaan organisasi.¹⁸ Kegiatan audit yang dijalankan oleh auditor internal terdiri dari audit kinerja, audit keuangan, dan audit untuk tujuan tertentu. Audit internal bertanggungjawab untuk menguji kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, mengevaluasi, mendeteksi, dan mencegah terjadinya resiko, korupsi, dan kecurangan. Dengan demikian, audit internal dirancang untuk memungkinkan semua komponen entitas melaksanakan tugasnya dengan baik dan efisien sehingga auditor internal dituntut untuk mampu mempertahankan objektivitas dan menganalisis ancaman terhadap suatu organisasi.¹⁹

Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut mendapatkan opini WTP dari BPK sebagai auditor eksternal. Sebelum diserahkan ke BPK laporan keuangan tersebut diserahkan terlebih dahulu ke Inspektorat Daerah selaku auditor internal untuk dilaksanakannya proses audit. Adanya peran auditor internal diharapkan mampu menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan berkualitas, sehingga peran auditor sebagai penjamin kualitas sangat penting dalam mendukung dedikasi kepala daerah untuk mencapai optimalisasi fungsi dan pengawasan yang tepat

¹⁸ Faiz Zamzami, dkk., *Audit Internal Konsep Dan Praktik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 1-2.

¹⁹ Marvin Zakiyatul Miskiyah, dkk., "The Role of Internal Auditors on The Quality of Financial Reporting," *Research in Accounting Journal* 2, no. 3 (2022): 371–372.

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁰ Seorang auditor internal harus memiliki keahlian serta keterampilan dalam menjalankan pemeriksaan. Terdapat kualifikasi auditor internal yang harus dimiliki oleh seorang audit, antara lain:²¹

- 1) Auditor internal harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai karena audit berhubungan dengan analisis dan pertimbangan.
- 2) Seorang auditor internal juga harus memiliki pengalaman dibidangnya.
- 3) Seorang auditor internal juga harus memiliki ide-ide yang cemerlang untuk membangun organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa auditor internal adalah aktivitas pemantauan pengendalian internal dalam sebuah organisasi yang dirancang untuk mengawasi, menilai, dan mengevaluasi kegiatan dalam organisasi serta memberikan saran untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien unsur pengendalian tersebut.²²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mendukung hasil yang sedang dilakukan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, juga digunakan untuk membandingkan hasil penelitian dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan sebagai berikut:

²⁰ Theodora F. Tomaso dan Hendra Meiman, "Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon Dan Provinsi Maluku," *Junral Pendidikan Ekonomi* 2, no. 1 (2022): 23.

²¹ Amin Widjaja Kusuma, *Interna Audit & Corporate Governance* (Jakarta: Harvindo, 2013).

²² Rachmat Arief, "Peran Audit Internal Atas Kualitas Pemeriksaan Laporan Keangan Yang Dilakukan Oleh Audit Eskternal Pada Sebuah Perusahaan," *Jurnal Ekonomi* 7, no. 1 (2016): 75, <https://media.neliti.com/media/publications/78768-ID-peran-auudit-internal-atas-kualitas-pemer.pdf>.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Susanto, Eka Nurmala Sari, dan Maya Sari dengan variabel independen penerapan SAP, kualitas SDM, penerapan SPIP, penggunaan teknologi informasi dan variabel dependen kualitas laporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa penerapan SAP, kualitas SDM, penerapan SPIP, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya menggunakan variabel independen penerapan SAP dan penerapan SPIP, menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan, pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan perbedaannya terletak pada metode analisis data dan objek penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode analisis data *Partial Least Square* sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Objek pada penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Langkat dengan menyebarkan kuesioner di seluruh SKPD sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara dengan menyebarkan kuesioner di Inspektorat Daerah dan BPKAD di masing-masing Kabupaten.²³
2. Penelitian yang dilakukan Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana dengan variabel independen penerapan SAP, sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, variabel dependen kualitas laporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa penerapan SAP dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya menggunakan variabel independen penerapan SAP dan sistem pengendalian intern, variabel dependen kualitas laporan keuangan, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, pengumpulan data menggunakan kuesioner, metode analisis

²³ Heri Susanto, dkk., "Factors Affecting The Quality of Financial Reports In The Government of Langkat Regency," *BIRCI-Journal* 4, no. 4 (2021): 12264.

data sama-sama menggunakan analisis regresi Linier berganda dan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di Kabupaten Karangasem dengan menyebarkan kuesioner di semua OPD. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara dengan menyebarkan kuesioner di BPKAD dan Inspektorat Daerah masing-masing Kabupaten.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatur Rohmah, Noor Shodiq Askandar, dan Arista Fauzi Kartika Sari dengan variabel independen pemahaman SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, variabel dependen kualitas laporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa pemahaman SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya pada variabel independen pemahaman SAP dan sistem pengendalian internal, variabel dependen kualitas laporan keuangan, metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, teknik sampling yang digunakan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu objek penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Malang dengan menyebarkan kuesioner di BPKAD saja, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian dilakukan di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara dengan menyebarkan kuesioner di BPKAD dan Inspektorat Daerah masing-masing Kabupaten.²⁵

²⁴ Ni Komang Ayu Mahartini, dkk., "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem," *Jurnal Karma* 1, no. 4 (2021): 1125.

²⁵ Lailatur Rohmah, dkk., "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang," *E-JRA* 9, no. 5 (2020): 43.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, dan Muhyarsyah dengan variabel independen kompetensi SDM, peran audit internal, kesuksesan SIKD, variabel dependen kualitas laporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa kompetensi SDM dan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kesuksesan penerapan SIKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya menggunakan variabel independen peran audit internal, variabel dependen kualitas laporan keuangan, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan langsung ke dua lembaga yaitu BPKAD dan Inspektorat, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode analisis data pada penelitian sebelumnya menggunakan *path analysis* sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya juga terletak pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian dilakukan di Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumtra Utara sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.²⁶
5. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Atika, Listya Devi Junaidi, dan Allia Irmadhani dengan variabel independen pemahaman akuntansi, pengalaman kerja, peran audit internal, variabel dependen kualitas laporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa pemahaman akuntansi dan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya menggunakan variabel independen peran audit internal, variabel dependen kualitas laporan keuangan, pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner, teknik analisis data sama-sama menggunakan analisis

²⁶ Siti Irafah, dkk., "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 2 (2020): 337.

regresi linier berganda, dan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu objek penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Medan dengan menyebarkan kuesioner di seluruh SKPD sedangkan pada penelitian ini dilakukan di pemerintah Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara dengan menyebarkan kuesioner di BPKAD dan Inspektorat Daerah di masing-masing Kabupaten.²⁷

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nunuy Nur Afiah dan Peny Cahaya Azwari dengan variabel independen penerapan SPIP dan variabel dependen kualitas laporan keuangan dan prinsip *good governance* menghasilkan penelitian bahwa penerapan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap prinsip *Good Governance*, dan penerapan SPIP melalui kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap prinsip *Good Governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya pada variabel independen penerapan SPIP, variabel dependen kualitas laporan keuangan, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan langsung di BPKAD dan Inspektorat, dan perbedaan penelitian terletak pada metode analisis data pada penelitian sebelumnya menggunakan *path analysis* sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian dilakukan di Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi Sumatra Selatan sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.²⁸

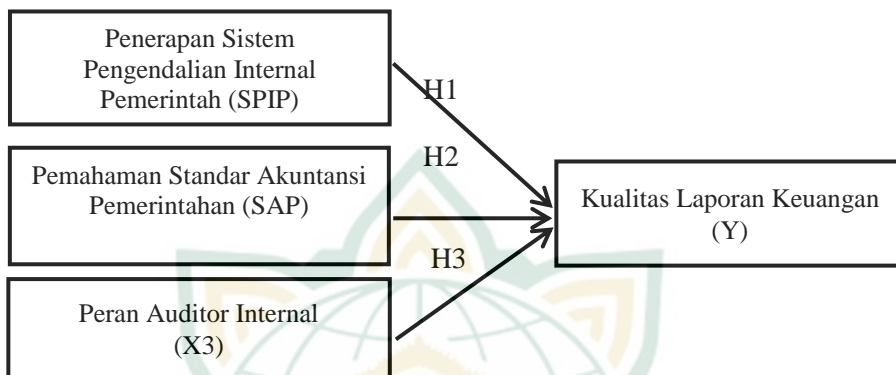
²⁷ Diyah Atika, dkk., "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan," *Jurnal Warta* 13, no. 4 (2019): 77.

²⁸ Nunuy Nur Afiah dan Peny Cahaya Azwari, "The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance: A Research In District, City, And Provincial Government In Sout." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211, (2015): 811-818 "

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu cara yang menjelaskan metode riset secara menyeluruh. Kerangka berfikir juga menggambarkan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Didasarkan pada landasan teori serta penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah ialah sebuah alat pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah kepada publik. Pemerintah selaku penyedia laporan keuangan harus menyediakan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem pengendalian internal pemerintah digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah. Semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Kualitas dari sebuah laporan keuangan dapat juga dilihat dari informasi yang akurat, relevan tepat waktu, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pemerintah dalam menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan juga perlu dilakukan proses audit terlebih dahulu oleh auditor internal pemerintah daerah. Audit internal digunakan sebagai alat untuk menangkal terjadinya kesalahan dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, peran auditor internal dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting guna untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam mempresentasikan suatu masalah atau mengemukakan suatu fenomena yang masih harus diuji kebenarannya. Yang masih perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis adalah jawaban yang dihasilkan masih bersifat sementara pada rumusan masalah penelitian sehingga antara hipotesis dengan rumusan masalah harus saling berhubungan secara stabil.²⁹ Berdasarkan kerangka berfikir dan hasil beberapa penemuan penelitian diatas, maka penjabaran hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu faktor yang mempengaruhi maksimalnya hasil audit terhadap kualitas laporan keuangan adalah dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik. Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan

²⁹ Maman Abdurahman, dkk., *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 150.

perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dalam penyusunannya harus didukung dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan sistem pengendalian internal dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan teori agensi, pemerintah selaku agen memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian internal yang berkaitan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian internal digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah agar dapat menciptakan laporan keuangan yang sesuai dengan penerapan pemerintah. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan yang semakin baik akan menghasilkan laporan keuangan yang semakin berkualitas. Hal ini juga didukung dengan penelitian terdahulu oleh Heri Susanto, Eka Nurmalasari, dan Maya sari menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.³¹ Bertolak belakang dengan penelitian Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.³² Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

³⁰ Dian Priatiningsih dan Fangela Myas Sari, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)," *Jurnal Ekombis* 8, no. 1 (2022): 104.

³¹ Heri Susanto, dkk., "Factors Affecting The Quality of Financial Reports In The Government of Langkat Regency," *BIRCI-Journal* 4, no. 4 (2021):12264.

³² Ni Komang Ayu Mahartini, dkk., "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem," *Jurnal Karma* 1, no. 4 (2021): 1125.

H1: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah dalam menyusun laporan keuangan harus benar-benar paham terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Standar akuntansi pemerintahan adalah suatu prinsip akuntansi yang diimplementasikan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.³³ Laporan keuangan akan menjadi sangat akurat dan terhindar dari kesalahan apabila pegawai pemerintah yang menyusun laporan tersebut telah memahami standar akuntansi pemerintah serta dapat menerapkan logika akuntansi dengan baik. Dengan demikian, Pemahaman SAP yang baik akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan pemerintah dapat dinyatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kriteria kualitatif yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.³⁴

Berdasarkan teori agensi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bisa diartikan dengan adanya kewajiban pemerintah selaku pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada publik selaku pihak pemberi amanah (prinsipal). Dari pernyataan tersebut dapat diperkirakan bahwa untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas dengan baik, maka pemerintah harus melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai

³³ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 271.

³⁴ Heru Mulyadi Santosa, dkk, "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaat Sistem Teknologi Informasi Terhadap Kualias Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Se-Eks. Karisidenan Surakarta)," *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 16 (2020): 324.

bentuk pertanggungjawabannya kepada publik. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lailatur Rohmah, Noor Shodiq Askandar, dan Aristta Fauzi Kartika Sari mengungkapkan bahwa pemahaman SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.³⁵ Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana menyatakan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.³⁶ Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah akan digunakan oleh beberapa pihak sebagai bahan dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah harus berkualitas sehingga informasi yang ada di dalam laporan keuangan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan peran auditor internal. Audit internal adalah sebuah kegiatan independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang organisasi untuk meningkatkan operasional organisasi.³⁷ Inspektorat Daerah selaku auditor internal pemerintah mempunyai peran yang sangat penting sebagai pengawas intern untuk mereview, mengevaluasi,

³⁵ Lailatur Rohmah, dkk., "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang," *E-JRA* 9, no. 5 (2020): 43.

³⁶ Ni Komang Ayu Mahartini, dkk., "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem," *Jurnal Karma* 1, no. 4 (2021): 1125.

³⁷ Syafrida Yuliana, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Internal Audit Erhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)," *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi* 3, no. 2 (2010): 206–220.

dan memantau semua kegiatan dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan teori agensi, peran auditor internal sebagai penjamin kualitas sangat penting dalam membantu kewajiban kepala daerah dalam mewujudkan optimalisasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal ini, audit internal digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kesalahan pelaporan keuangan dan mengurangi biaya signifikan yang berhubungan dengan kegiatan. Semakin baik peran auditor internal maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas.³⁸ Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, dan Muhyarsyah menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.³⁹ Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Diyah Atika, Listya Devi Junaidi, dan Allia Irmadhani mengungkapkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.⁴⁰ Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

³⁸ Frasca Ardy Nugroho dan Widhy Setyowati, "Pengaruh Komitmen Organisasional, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Journal of Economics and Banking* 1, no. 2 (2019): 128–129.

³⁹ Siti Irafah, dkk., "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (2020): 337.

⁴⁰ Diyah Atika, dkk., "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan," *Jurnal Warta* 13, no. 4 (2019): 77.